

## PRAKTEK JUAL BELI BARANG KADALUARSA DI KOTA PALANGKA RAYA

Abdul Khair <sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The background of the study is that there are practices of sale and purchase of expired goods at city of Palangka Raya although the Law number 8 1999 about the Protection of Consumers (Perlindungan Konsumen) prohibits about those practices which endanger the consumers. The objective of the study is to know the factors that cause the practices of sale and purchase of expired goods existing in Palangka Raya and how the legal solutions are taken to solves the impacts of the practices of sale and purchase of expired good at Palangka Raya. The method of the study is descriptive qualitative research so that the researcher is able to know and describe what happens in the location of the study clearly and in detailed as well as disclosing the data. Results of the study are in the form of the causes of the practices of sale and purchase of expired goods can be described as follows: (1) the traders do not know that they sell the expired goods while the others sell the expired good intentionally, (2) the lack of direction and control from the government, (3) the limited numbers of personnel of the Regional Office of Industry and Commerce Department, and (4) the traders that are subjected to unannounced inspections of the authority are not given sanctions so that there is no deterrent effect.*

**Kata Kunci :** jual beli, barang kadaluarsa

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen jurusan syari'ah STAIN Palangka Raya, alamat rumah Jl. widuri II No.3 G. Obos XII Palangka Raya, Email: khairstain@gmail.com



bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan semakin bervariasi, baik produk luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, sebab adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sebab konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen (Miru, 2004:37).

Berkenaan dengan hal ini, maka dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen yang dianggap lemah tidak dirugikan. Pada pasal 4 huruf a Undang-Undang ini ada diatur tentang hak konsumen, yaitu: "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".

Sedangkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu, diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Di samping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap atau EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen yaitu sebagai berikut: (1) hak perlindungan kesehatan dan keamanan; (2) hak perlindungan kepentingan ekonomi; (3) hak mendapat ganti rugi; (4) hak atas penerangan; dan (5) hak untuk didengar (Badrulzaman, 1986:81).

Salah satu dari hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas adalah hak perlindungan kesehatan, maksudnya adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

Mengamati hak-hak konsumen sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini para pedagang, baik besar maupun kecil, harus memperhatikan hak-hak konsumen tersebut. Sehingga para konsumen akhirnya tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang telah diatur oleh undang-undang.

Anehnya praktik jual beli barang kadaluarsa ini tidak saja dilakukan oleh pedagang kecil, tetapi di supermarket-supermarket pun masih terdapat barang kadaluarsa, terutama menjelang hari-hari besar agama seperti menjelang lebaran, natal, dan tahun baru, yang dikemas dalam bentuk parcel.

Berdasarkan observasi penulis di Kota Palangka Raya, terutama di toko-toko yang menjual makanan dan minuman, memang masih ada ditemukan barang-barang kadaluarsa yang dipajang di toko mereka. Konsumen yang mengkonsumsi barang yang sudah kadaluarsa ini dapat membahayakan kesehatan, seperti keracunan dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

## B. BARANG KADALUARSA: PERSPEKTIF HUKUM

### 1. Jual Beli Barang Kadaluarsa

Istilah jual beli diartikan berdagang atau berniaga atau menjual dan membeli barang-barang (Poerwadarminta, 1976:423) tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena demikian lekatnya dengan kehidupan kita sehingga jual belipun diatur dalam regulasi seperti dalam pasal 1457 KUH Perdata. Dalam pasal ini jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam pengertian yang umum jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan" agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah (Abdullah, <http://pembelajaran.bisnis.syari'ah.ac.id>).

Selain istilah jual beli, yang perlu mendapat elaborasi dalam uraian ini adalah istilah kadaluarsa. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 180/Men.Kes/Per/W/85 pasal 1 huruf c. disebutkan bahwa makanan Kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsanya. Dalam KUH Perdata yaitu pada pasal 1946 dikemukakan bahwa kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Barang makanan dan minuman yang diimpor dari luar negeri biasanya bertuliskan *Display Until*, *Sell By*, *Use By*, atau ada juga yang bertuliskan *Best Before*. Jika menemukan tulisan seperti *Use By*, maka barang tersebut sebaiknya jangan dikonsumsi lagi, akan tetapi segera melapor dengan penjual agar dia segera menarik produk tersebut dan tidak menjual lagi karena sudah berbahaya.

Berbeda dengan istilah *Best Before*, produk yang sudah melewati tanggal ini mungkin masih layak untuk dikonsumsi tapi sudah tidak segar atau tidak



sebaik bila dikonsumsi sebelum tanggal yang tertera. Akan tetapi jika menemukan telur yang melewati tanggal *Best Before*, maka jangan dikonsumsi lagi karena dikhawatirkan sudah mengandung kuman *salmonella* yang dapat membahayakan bagi kesehatan.

Kedua istilah di atas merupakan istilah utama yang harus diingat, sedangkan *Sell By* dan *Disply Until* umumnya digunakan oleh toko-toko tertentu untuk mengingatkan staf penjualan kapan mereka harus menarik produk tersebut dari tempat penjualan. Jadi, istilah ini memang tidak selalu ada pada produk-produk yang dijual. Selain itu produk yang melewati batas *Sell By* sebenarnya masih layak dijual selama belum melewati batas *Use By* atau *Best Before*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum jual beli ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut: (a) Pasal 1457 yang berbunyi: "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan", (b) Pasal 1459: "Hak milik barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616", (c) Pasal 1474: "Jika terjadi jual beli, maka ada dua kewajiban penjual yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya, termasuk jika barang itu ada cacat tersembunyi".

Sedangkan dalam al-Qur'an mengenai jual beli diatur dalam surah al-Baqarah ayat 275: Artinya:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

## 3. Syarat-syarat dan Azas Jual Beli menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..."

Jadi merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Buku III KUH Perdata disebutkan, perjanjian memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak.

Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya kontrak/perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan kata lain para pihak pembuat kontrak/perjanjian tersebut dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti tetap selalu berada dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian atau jual beli sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 BW adalah: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan: (a) tidak ada paksaan; (b) tidak ada kekeliruan; (c) tidak ada penipuan.

Kalau dikaitkan dengan pasal 1320 BW ini bahwa praktik jual beli barang yang sudah kadaluarsa adalah termasuk penipuan.

### b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu, harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi



segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu (Subekti, 1979:13). Sedangkan bila dilihat dari sudut ketertiban umum maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya (Ichsan, 1967:126).

Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

#### c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, sedikit-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

#### d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab halal merupakan syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pada kenyataannya, ada perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga maknanya mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Misalnya muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti ini dikenal dengan perjanjian baku (*standard of contract*).

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang harus diterapkan, yaitu sebagai berikut: (1) Azas konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepekat; (2) Azas kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian; (3) Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku; (4) Azas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum; (5) Azas keseimbangan, maksudnya adalah dalam melaksanakan perjanjian harus

ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (6) Azas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

Ketika kontrak jual beli diadakan maka para pelaku yang terkait di dalamnya, yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen harus mematuhi azas-azas perjanjian ini, demi tertibnya pelaksanaan perjanjian tersebut.

#### e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Mengenai hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan, ada diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 disebutkan sebagai berikut:

Hak konsumen adalah sebagai berikut: (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Saat ini hak perlindungan konsumen ini sudah mendapat perhatian dari masyarakat dunia, sehingga lahirlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlindungan konsumen tahun 1985, yaitu sebagai berikut: (a) Hak atas keamanan dan keselamatan; (b) Hak mendapat informasi yang benar; (c) Hak memilih; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; dan (e) Hak atas lingkungan hidup (Djumhana, 1994: 338).

Dengan adanya hak-hak konsumen yang merupakan peraturan perlindungan konsumen, maka diharapkan di satu pihak dapat menghindarkan hal-hal yang merugikan konsumen, dan dilain pihak dapat mendukung kegiatan produsen, seperti: (a) Mencegah beredarnya barang yang tidak memenuhi syarat, seperti barang kadaluarsa; (b) mencegah terjadinya persaingan yang tidak wajar diantara produsen baik melalui iklan maupun cara lainnya; dan (c) Memberikan



jaminan kepada konsumen sehingga kepercayaan masyarakat akan menguntungkan produsen dalam pemanfaatan modal.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; (b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; dan (d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Lihat Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999).

Keberadaan hak sangat erat hubungannya dengan kewajiban, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Disinilah pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan dengan kewajiban.

#### **f. Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha**

Hak dan kewajiban selalu bergandengan, dan memang harus dilaksanakan secara seimbang. Hak-hak produsen atau pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: (a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (b) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c) Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan (e) Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Mengenai kewajiban produsen atau pelaku usaha ada beberapa macam, berdasarkan pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan kewajiban produsen atau penjual adalah: (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; (d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan; dan (f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian seorang penjual tidak diperbolehkan menawarkan dan atau menjual barang dan/atau jasa melalui penawaran yang mengandung pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap konsumen.

#### **C. PENYELESAIAN SENGKETA BARANG KADALUARSA**

Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Menurut Nasution, sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (public atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu (Nasution, 1995:221). Sedangkan Sidharta, berpendapat bahwa sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara (Sidharta, 2000:83).

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sengketa konsumen adalah sengketa pelaku usaha dan konsumen". Pelaku usaha yang dimaksud adalah (1) setiap orang atau individu, (2) badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pada pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kalau dihubungkan antara pasal 45 ayat (2) ini dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

*Pertama*, Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan pasal 1851 sampai pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (*dading*);

*Kedua*, Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku; dan *Ketiga*, Penyelesaian diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Nasution, 1995:221).



Pasal 45 ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu cara dari tiga macam, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan satu persatu, yaitu:

### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Umum

Berdasarkan bunyi pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sedangkan pada ayat 46 (1) disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; (b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; (c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; (d) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit (Pasal 46 (1) UUPK).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya memungkinkan apabila: (a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau; dan (b) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa (Miru, 2004:234).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, baik dengan menggunakan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses berperkaranya, antara lain adalah tentang beban pembuktian dan besarnya biaya yang dikeluarkan.

### 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Umum

Untuk mengatasi berlakunya proses peradilan di pengadilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya ini dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang sedang bersengketa.

Pasal 47 UUPK menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk "menjamin" tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen".

Menurut UUPK pasal 52, bentuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini ada tiga macam, yaitu: (a) Mediasi; (b) Arbitrase, dan; (c) Konsiliasi. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan penulis paparkan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

#### a. Mediasi

Mediasi adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, dimana majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat aktif sebagai perantara dan/atau penasihat.

Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak ke tiga (*a third party*) yaitu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa dan mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian yang telah disepakati (Shofie, 1999:23). Sehingga mediator ini berada ditengah-tengah artinya tidak memihak pada salah satu pihak.

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. Kekuatan dari putusan mediator ini kekuatannya tidak secara mutlak untuk mengakhiri sengketa, dan juga tidak mengikat secara mutlak, akan tetapi tergantung pada itikad baik para pihak untuk mematuhi.

Keuntungan yang di dapat dengan menggunakan mediasi ini adalah penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (musyawarah tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang dan kalah dan tidak emosional (Miru 2004:257).

#### b. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat



para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Menurut Rachmadi Usman, lembaga arbitrase memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain: (a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; (b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif; (c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, disamping jujur dan adil; (d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan (e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan (Usman, 2002: 2).

Demikian telah penulis uraikan tentang penyelesaian jika ada terjadi sengketa antara pelaku usaha atau pedagang dengan konsumen, dengan adanya beberapa alternatif penyelesaian ini maka para pihak dapat memilih yang mana sesuai dengan kesepakatan mereka.

#### D. PENYEBAB JUAL BELI BARANG KADALUARSA

Jual beli barang kadaluarsa yang marak dilakukan di berbagai tempat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

##### a. Ketidaktahuan Pedagang atas masa kadaluarsa

Pedagang tidak pernah mengontrol barang dagangannya, terutama tanggal kadaluarsanya sehingga sebagian barang yang mereka perdagangkan luput dari perhatian mereka dan tetap dipajang di toko. Penjualan barang yang kadaluarsa memang sangat membahayakan orang lain apalagi berkenaan dengan makanan dan minuman.

Pemberitaan di media lokal Kalteng Pos pada tanggal 23 Agustus 2010 ditemukan adanya dampak dari konsumsi barang yang sudah dianggap tidak layak konsumsi, yaitu meninggalnya konsumen. Pemantauan makanan kadaluarsa oleh dinas terkait sangat diharapkan warga masyarakat. Tidak saja makanan kadaluarsa, tapi juga makanan yang rentan tercemar bakteri dan ayam tiren yang diduga banyak dijual akibat kebutuhan dan permintaan meningkat saat menjelang ramadhan dan mendekati lebaran.

Dengan adanya pemantauan dan razia dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan pedagang menjadi lebih waspada, mengontrol barang dagangannya dan mengetahui secara tepat jika barang dagangannya bebas kadaluarsa.

##### b. Unsur Kesengajaan Penjual

Faktor lain yang menyebabkan adanya jual beli barang kadaluarsa ini adalah adanya unsur kesengajaan dari penjual, dalam hal ini pedagang/penjual sebenarnya dia mengetahui bahwa ada barang jualannya yang sudah kadaluarsa. Namun demikian mereka tetap memajang barang yang tidak layak konsumsi tersebut.

Hal tersebut dilakukan pedagang tidak lepas dari hasrat *money hunger*, memburu keuntungan yang banyak dari barang yang dibeli dengan harga yang murah. Pedagang mengakui jika mereka mengetahui larangan menjual barang yang sudah kadaluarsa, akan tetapi ini dilakukan agar tidak mengalami kerugian. Secara yuridis tindakan ini bertentangan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 tentang Mutu Pangan dan Keamanan Pangan.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pedagang dan konsumen, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pedagang yang merugikan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen (Widjaja, 2008:3).

Perilaku yang merugikan konsumen merupakan perbuatan yang melawan hukum (sebagai kasus perdata) dan tindak pidana. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan pertanggungjawaban pelaku usaha (*product liability*) (Harkrisnowo, 1996:6). Oleh karena itu kualifikasi gugatan yang lazim digunakan secara konvensional didasarkan atas adanya dalil wanprestasi (*default*) dan perbuatan melawan hukum.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu: (a) adanya perbuatan; (b) adanya unsur kesalahan; (c) adanya kerugian yang diderita; dan (d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Daniel Retor Datubakko, SE, Kepala Bidang Konsumen Dan Pengawasan barang Beredar Kota Palangka Raya membenarkan adanya unsur kesengajaan dari pedagang atau penjual dalam menjual barang yang sudah



kadaluarsa, buktinya adalah setiap kali diadakan razia selalu banyak ditemukan barang yang sudah kadaluarsa, bahkan selalu cenderung bertambah.

Apabila ada penjualan barang yang disebut dengan cuci gudang perlu diwaspadai, terutama berkaitan dengan produk pangan, makanan dan minuman. Hal ini memerlukan pengontrolan secara lebih teliti, terutama tanggal expired-nya. Praktik jual beli barang kadaluarsa sering terjadi namun pelaku selalu luput dari perhatian petugas. Hal ini terjadi karena adanya kolaborasi antara pedagang secara baik. Apabila ada razia dari petugas, maka antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain saling memberitahukan melalui Hand Pong (HP) sehingga mereka cepat mengetahui dan dapat membenahi barang dagangannya.

### c. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Kurangnya pembinaan dari pemerintah ini bisa dalam bentuk kurangnya sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada para pedagang. Sehingga pedagang banyak di antara pedagang yang tidak tahu adanya larangan menjual barang kadaluarsa. Bahkan, yang mengetahui pun masih rendah motivasinya untuk tidak menjual barang kadaluarsa.

Daniel mengakui kurangnya sosialisasi tentang larangan menjual barang yang sudah kadaluarsa. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Pada tahun 2009 pernah diadakan sosialisasi dengan berjumlah 100 (seratus) orang dengan sasaran adalah: Guru TK, guru SD, guru SLTP, guru SLTA, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), anggota PKK dan anggota Dharma Wanita.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama ini adalah salah sasaran, yaitu: (1) semestinya yang menjadi objek sosialisasi dari larangan menjual barang kadaluarsa itu adalah para pedagang yang menjual sembako; dan (2) walaupun ada yang diundang pedagang, akan tetapi yang menghadirinya adalah anak si pedagang tersebut ada juga yang menyuruh karyawannya.

Upaya meminimalisasi praktik jual beli barang kadaluarsa memerlukan penanganan pemerintah secara serius dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang, terutama pedagang makanan dan minuman sehingga tujuan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat tercapai. Pengawasan yang dilakukan secara memadai sangat membantu melindungi konsumen dari bahaya konsumsi barang tak layak konsumsi. Pengawasan dimaksud bisa meliputi: (1) Diri pelaku; (2) Sarana dan prasarana produksi; (3) Iklim usaha secara keseluruhan; (4) Konsumen.

Pasal 29 dari Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan konsumen dimaksudkan untuk: (1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; (2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen perlindungan konsumen swadaya masyarakat; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat dijamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh: (1) Pemerintah; (2) Masyarakat; dan (3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa perorangan, kelompok, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian dan survey terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat.

Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah: (1) Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kesehatan manusia; (2) Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (3) Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengingat pentingnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dalam dunia perdagangan, sehingga diharapkan tidak ada lagi praktik jual beli barang kadaluarsa, maka masalah ini harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

### 1. Penyelesaian Hukum Praktik Jual-beli Barang Kadaluarsa

Praktek jual beli barang kadaluarsa memiliki sanksi hukum yang jelas bagi pelanggarnya. Namun acapkali pelaku pelanggaran itu dikenakan sanksi sangat ringan. Sanksinya, barang yang dianggap tidak layak diminta agar ditepis atau disimpan dan tidak boleh dipajang di toko serta menarik barang kadaluarsa diganti dengan barang baru.

Sanksi ringan yang diberikan kepada pelanggar undang-undang menyebabkan mereka tidak jera dan akibatnya masalah ini tidak pernah tuntas. Razia yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dua (2) kali, yaitu razia berkala dan razia khusus



Razia berkala dilakukan hanya dua kali setahun yaitu menjelang lebaran dan menjelang hari natal, sedangkan razia khusus akan dilakukan jika ada ditemukan permasalahan yang khusus, misalnya ada yang sampai masuk rumah sakit atau ada jatuh korban gara-gara makan atau minum makanan yang diduga sudah kadaluarsa.

Karena razia ini dilakukan hanya dua kali setahun, maka kemungkinan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa ini sangat terbuka misalnya setelah lebaran tidak ada lagi razia sehingga peluang pedagang untuk menjual barang kadaluarsa sangat besar. Disamping itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan razia hanya ditempat-tempat yang strategis saja, seperti di pasar Kahayan, pasar Besar, dan di supermarket dan tidak menyeluruh.

Kurangnya dan terbatasnya tempat yang di razia disebabkan kurangnya anggaran yang mereka miliki dan terbatasnya personel yang ada. Sanksi yang diberikan kepada pedagang yang menjual makanan dan minuman yang kadaluarsa pun sangat ringan. Hal ini meneurut Daniel karena pihaknya masih bersifat membina, alasannya adalah Kota Palangka Raya masih bersifat membangun, dengan demikian diharapkan perdagangan di kota ini bisa tumbuh dengan cepat sehingga kota Palangka Raya cepat maju.

Sudah saatnya pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya bertindak tegas terhadap pedagang yang menjual barang yang sudah kadaluarsa. Akibat barang kadaluarsa menyebabkan adanya konsumen yang meninggal.

Undang-undang No.32 Tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal 80 ayat 4 disebutkan : "Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-

Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada diatur tentang larangan menjual barang kadaluarsa, yaitu: *Pertama*, Pasal 8 ayat (1) yaitu: "pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (1) tidak memenuhi atau sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan pada label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (3) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; dan (4) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu.

*Kedua*, Pasal 62 ayat (1) yaitu: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sanksi terhadap pedagang yang menjual barang kadaluarsa, jika ditinjau dari undang-undang di atas sangat berat, Dan, memang seharusnya ini dapat diterapkan sehingga resiko/bahaya yang dihadapi konsumen dapat tereliminasi sedemikian rupa.

#### D. PENUTUP

Pada bagian ini terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diajukan agar praktek jual beli barang kadaluarsa tidak menjadi fenomena biasa di tengah kerisauan konsumen yang luar biasa. *Pertama*, pengawasan barang yang kadaluarsa di Kota Palangka Raya memerlukan instrumen kebijakan publik dari pemerintah, seperti apa yang dilakukan oleh Asosiasi Paretel Indonesia (Aprindo), yang membuat kebijakan dengan cara pengawasan barang kadaluarsa melalui konsumen.

*Kedua*, Jika ditemukan ada pedagang yang masih menjual barang kadaluarsa, maka harus diberi sanksi tegas misalnya denda sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga membuat mereka menjadi jera dan tidak lagi menjual barang kadaluarsa.

*Ketiga*, Para konsumen yang membeli barang terutama makanan dan minuman harus teliti, sebelum membeli terlebih dahulu memperhatikan tanggal expired pada kemasan barang.



- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (symposium, Seminar, Lokakarya)*, Jakarta, 1986.
- Badrulzaman, Meriam Darus, Hasil Simposium, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku*, BPHN, Jakarta, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1998.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UIP. Jakarta, 1992.
- Miru, Ahmadi & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsomen*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nasution, ZA *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Nashir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta 2000.
- *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, Jakarta, 1973.
- Riduan Syahrani, *Hukum Perdata I*, Diklat Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1984.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985.

## B. Buku Elektronik

- Abdullah al-Mushlih, *Jual Beli dan Hukum-hukumnya*, <http://pembelajaran.bisnis.syari'ah.ac.id>.
- Hendro Wibowo, *Bai' (Jual Beli)*, <http://tinyurl.com>.

## C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
- UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.32 tahun 1992 tentang Kesehatan
- PP No. 28 Tahun 2004 tentang Mutu Pangan dan Keamanan Pangan